

Sosialisasi Tata Kelembagaan, Pengelolaan Dana Desa, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Bumdes

Socialization of Institutional Structure, Village Fund Management, and Human Resource Development in Bumdes

¹Arifiani Widjayanti*, ²Eddy Kusponco Wibowo, ³Heny Handayani

^{1,2,3}Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

e-mail: ¹arifiani@stialan.ac.id, ²edy_kusponco@yahoo.com, ³heny.handayani@stialan.ac.id

Informasi Artikel: (Dikirim 03/07/25; Revisi 21/11/25; Diterima 28/12/25)

ABSTRAK

Desa merupakan bagian yang penting dalam keberadaan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, desa berperan sebagai lembaga terdekat dengan masyarakat, sehingga dapat menasar kelompok yang ingin sukses melalui pembentukan badan ekonomi atau organisasi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih mengenai tata kelola kelembagaan desa, pengelolaan dana desa, serta pengembangan sumber daya manusia desa, terutama pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Penerapan PKM ini dilakukan melalui sosialisasi ke beberapa Bumdes di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Melalui sosialisasi tersebut, Bumdes yang diundang menjadi lebih memahami praktik tata kelola kelembagaan serta penggunaan dana desa pada Bumdes. Sedangkan dalam pengembangan sumber daya manusianya, Bumdes lebih memahami bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan cara (1) rekrutmen, (2) pelatihan, dan (3) pengembangan karir. Lalu, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui adanya (1) keterlibatan aktif masyarakat, (2) masukan dari masyarakat, serta (3) manfaat yang diperoleh dari Bumdes. Sehingga secara keseluruhan, sosialisasi terhadap Bumdes di Kecamatan Caringin ini memberikan pemahaman mendalam terkait tata kelola kelembagaan, penggunaan dana desa, pengembangan sumber daya manusia, yang pada akhirnya menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci—desa, kelembagaan, sumber daya manusia, dana desa, Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)

Keywords—village, institution, human resource, village funds, Bumdes (village-owned enterprise)

© The Author(s)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

Villages are an important part of Indonesia's existence. In realizing national development goals, villages play a role as institutions closest to the community, so that they can target groups that want to succeed through the formation of economic bodies or village community organizations to improve regional welfare. Community Service (PKM) aims to provide a better understanding and knowledge of village institutional governance, village fund management, and village human resource development, especially in Village-Owned Enterprises (Bumdes). The implementation of PKM is carried out through socialization to several Bumdes in Caringin District, Bogor Regency. Through these socialization activities, the invited Bumdes gained a better understanding of institutional governance practices and the use of village funds in Bumdes. Meanwhile, in terms of human resource development,

Bumdes gained a better understanding that this can be done through (1) recruitment, (2) training, and (3) career development. Furthermore, community participation can be achieved through (1) active community involvement, (2) community input, and (3) benefits obtained from Bumdes. Overall, the socialization of Bumdes in Caringin Subdistrict provided a deep understanding of institutional governance, the use of village funds, and human resource development, which ultimately fostered community participation.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah memberikan dasar sebagai panduan dalam mengembangkan desa di masa depan. Desa dan keberadaan bangsa Indonesia tidaklah dapat terpisahkan. Desa merupakan unit terkecil yang menampilkan keberagaman budaya dan masyarakat Indonesia. Selama ini, keberagaman tersebut mendukung keberlangsungan dan kelangsungan hidup bangsa. Dalam hal ini, desa yang kuat adalah penting terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, dukungan bagi desa dalam menjalankan wewenangnya sangatlah penting. Desa memiliki hak untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan asal usul, tradisi, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat desa. Di samping itu, desa juga mengatur lembaga-lembaga serta sumber-sumber pendapatan yang ada. Warga desa memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta mendapatkan pelayanan yang adil.

Peran lembaga desa masih memerlukan pengembangan kapasitas desa, melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas aparatur desa, baik secara individu maupun kelembagaan. Dengan begitu, mereka akan lebih mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam pengelolaan desa serta memperkuat pengembangan kapasitas desa itu sendiri. Pengembangan desa diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pedesaan harus melingkupi pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, penguatan aset, penciptaan lapangan kerja, penataan kawasan, serta penguatan sistem kelembagaan (Gai et al., 2020). Pengembangan desa dilakukan melalui peningkatan tiga aspek utama, yaitu (1) ketatalaksanaan, kelembagaan, dan infrastruktur, (2) kualitas sumber daya manusia, dan (3) pengelolaan dana desa.

Eksistensi lembaga desa berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan tugas serta peran pemerintahan desa dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan pemerintahan desa. Tata kelola organisasi pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan seluruh potensi desa, memudahkan masyarakat atau publik dalam menerima informasi melalui ketersediaan data, mendorong partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas (Hajar et al., 2021). Terdapat beberapa elemen yang dapat membangun sebuah organisasi, antara lain individu-individu, kolaborasi, dan sasaran tertentu. Organisasi merupakan sistem interaksi saling memengaruhi antara individu dalam suatu kelompok demi tujuan tertentu, yang diatur dalam satu kesatuan kerja dengan kerangka tertentu, serta terdapat interaksi kerja antara kesatuan kerja tersebut. Institusi krusial dalam kerangka organisasi desa adalah unit usaha yang dimiliki oleh desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pemerintah desa, di mana salah satunya adalah Bumdes.

Bumdes dalam organisasi pemerintahan desa, merupakan sebuah entitas legal yang didirikan oleh desa dan/atau perangkat desanya, dengan tujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi serta produktivitas, mengurus sumber daya, menawarkan layanan, melaksanakan aktivitas ekonomi lainnya demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa yang maksimal (Darodjat & Harrieti, 2025; Kusdiyanto & Pahlevy, 2024; Mubarok & Turpyrn, 2023; Salman et al., 2022). Aktivitas ekonomi ini tumbuh dari adat istiadat dan budaya setempat, seperti komunitas pengumpulan dana dan institusi ekonomi lokal, serta usaha ekonomi yang disediakan oleh otoritas pemerintah dan pemerintah daerah untuk warga. Contoh dari beragam inisiatif tersebut meliputi Koperasi Simpan Pinjam Desa, Lembaga Pemberian Pinjaman berbasis komunitas, Kredit Desa, program P2KP, serta program UPK PKK, serta sejumlah

inisiatif lain yang ada dan berfungsi di tingkat desa. Pembiayaan untuk usaha Bumdes seharusnya didapatkan dari orang-orang di lingkungan sekitar. Namun begitu, peluang bagi Bumdes untuk meminta pinjaman dari pihak luar, seperti pemerintah desa atau lembaga lain, masih tersedia, bahkan dapat dilakukan melalui perantara (Siswanto et al., 2023). Badan usaha yang dimiliki desa umumnya memiliki dua ciri utama, yaitu: (1) badan usaha yang dimiliki oleh desa, berfungsi untuk kerja sama dan kolaborasi di sektor ekonomi serta pelayanan publik; (2) keuntungan yang diperoleh dari badan usaha milik desa digunakan untuk (a) pengembangan usaha, (b) pembangunan desa, memperkuat komunitas desa, serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang kurang beruntung melalui berbagai jenis subsidi, bantuan masyarakat, dan inisiatif modal yang berputar (Rohim, 2021; Sakir et al., 2022).

Dalam proses pembangunan wilayah, perbedaan sosial ekonomi antara desa dan kota menjadi masalah penting. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh disparitas pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan serta kesempatan kerja (Yenny et al., 2025). Di Indonesia, angka kemiskinan lebih tinggi terjadi di wilayah pedesaan daripada perkotaan. Terkait dengan hal tersebut, beberapa daerah di Indonesia terindikasi melakukan penyimpangan terhadap dana desa, baik pada fase perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam laporan pertanggungjawaban, baik langsung melalui pemerintah desa maupun melalui lembaga ekonomi desa seperti Bumdes. Dalam hal ini, kapasitas sumber daya manusia yang kurang, serta tata kelembagaan yang tidak dipahami dengan baik, turut menyumbang penyimpangan tersebut, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan di perdesaan. Beberapa hal tersebut diketahui menjadi penyebab belum terwujudnya keseluruhan tujuan pembangunan desa di Kecamatan Caringin, Bogor (Ghassani et al., 2023), sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat kali ini. Hal tersebut antara lain nampak dari jalan desa yang masih terbelah, meskipun beberapa bangunan pemerintah desa nampak berdiri kokoh. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa menjadi lembaga pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Bumdes, sebagai lembaga desa yang mengelola perekonomian dan juga dana desa di Kecamatan Caringin, diharapkan dapat turut berperan serta dalam menopang pembangunan desa, sehingga keseluruhan tujuan pembangunan dapat terwujud. Sehingga, isu terkait tata kelola kelembagaan desa, pengelolaan dan penggunaan dana desa, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia desa menjadi fokus utama dalam pengabdian masyarakat di Kecamatan Caringin, Bogor. Hal ini terutama difokuskan pada kelembagaan badan usaha milik desa, yang berperan dalam pengelolaan ekonomi desa serta dana desa. Diharapkan ke depannya, tidak ada lagi ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan manusia desa di Kecamatan Caringin, Bogor. Di mana pada akhirnya, fokus pengabdian masyarakat kepada tiga isu tersebut, dapat mendorong pertumbuhan partisipasi masyarakat yang memadai ke depannya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara terstruktur dalam beberapa komponen sebagai berikut:

a) Lokasi dan Waktu

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tepatnya di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Aula kantor kecamatan digunakan sebagai tempat sosialisasi kepada beberapa lembaga badan usaha milik desa di kecamatan tersebut. Sosialisasi ini dilakukan dalam dua kurun waktu yang berbeda yaitu di bulan Juli 2024 sebagai persiapan dan bulan Agustus 2024 sebagai waktu inti dilakukannya sosialisasi mengenai kapasitas kelembagaan, pengelolaan dana desa, serta pengembangan sumber daya manusia di badan usaha milik desa Kecamatan Caringin, Bogor.

b) Sasaran Peserta

Para peserta yang disasar dan hadir meliputi kepala desa, pendamping desa, perwakilan kecamatan, serta perwakilan Bumdes. Dalam hal ini, para perwakilan Bumdes dari 12 desa yang ada di Kecamatan Caringin, Bogor menjadi sasaran utama sosialisasi tata kelembagaan, pengelolaan dana desa, dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga ekonomi desa Bumdes.

c) Tahapan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahapan penting, yaitu tahapan persiapan yang dilakukan pada 24 Juli 2024 dan tahapan pelaksanaan yang dilakukan pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2024. Pada tahapan persiapan, tim pengabdian masyarakat dari Politeknik STIA

LAN Jakarta beserta jajaran Kecamatan Caringin berdiskusi dan membuat kesepakatan mengenai beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memperlancar sosialisasi. Hal ini termasuk penyediaan snack, minum, serta makan siang bagi peserta, di samping penyediaan materi dan prosedur pelaksanaan sosialisasi selama tiga hari. Kemudian pada tahap pelaksanaan, dilakukan sosialisasi. Pada hari pertama, dilakukan pengenalan masalah kepada para peserta sosialisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi inti pada hari kedua, dan ditutup pada hari ketiga dengan diskusi serta tanya jawab tentang isu-isu yang dihadapi oleh beberapa Bumdes di Kecamatan Caringin.

d) Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab dengan peserta mengenai tata kelembagaan, pengelolaan dana desa, serta pengembangan sumberdaya manusia pada badan usaha milik desa. Pada tahap ini juga digali mengenai peran serta Bumdes dalam menggerakkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dan mengawasi Bumdes, terutama dalam pengelolaan dana desanya dan kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Materi diberikan secara langsung kepada peserta sosialisasi selama acara berlangsung. Kemudian, pada saat sosialisasi berakhir, peserta masih dapat melakukan diskusi dengan tim pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai media secara online, maupun bertemu langsung.

e) Output Kegiatan

Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, Bumdes yang diundang menjadi lebih memahami praktik tata kelola kelembagaan serta penggunaan dana Bumdes. Di mana secara keseluruhan, sosialisasi terhadap Bumdes di Kecamatan Caringin ini memberikan pemahaman mendalam terkait tata kelola kelembagaan, penggunaan dana desa, pengembangan sumber daya manusia, yang akhirnya menyumbang pada penumbuhan partisipasi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Caringin merupakan salah satu wilayah Kabupaten Bogor paling ujung, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi. Daerah ini merupakan daerah perlintasan dari wilayah Ibu Kota Jakarta menuju daerah Sukabumi, sehingga berbatasan langsung juga dengan beberapa pintu tol (Bahar, 2020). Namun begitu, bila diperhatikan dengan seksama, beberapa infrastruktur jalan yang melintas di dalam perdesaannya masih membutuhkan perhatian. Banyak jalan desan berlubang dan belum tersentuh perbaikan dari pihak kecamatan. Dalam hal ini, diharapkan pengelolaan dana desa, termasuk yang dikelola oleh Bumdes, dapat turut menopang pembangunan desa.

Sosialisasi dilakukan pada beberapa lembaga ekonomi desa, dalam hal ini Bumdes di 12 desa yang ada, melalui perwakilannya masing-masing di aula Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Pada hari pertama sosialisasi, pembukaan acara dilakukan oleh jajaran pejabat Kecamatan Caringin, Bogor beserta Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Politeknik STIA LAN Jakarta. Beberapa saat setelah pembukaan acara selesai dilakukan, maka pengenalan dan pemahaman masalah dipresentasikan dan didiskusikan bersama dalam sosialisasi tersebut bersama para peserta. Kemudian pada hari kedua, sosialisasi dilakukan kepada para peserta, yaitu perwakilan-perwakilan dari Bumdes-Bumdes di 12 desa yang terdapat di Kecamatan Caringin, Bogor. Materi sosialisasi dibagikan kepada para peserta, di mana membahas secara khusus mengenai tata kelola kelembagaan lembaga Bumdes sebagai salah satu pihak di pemerintahan desa yang turut mengelola dana desa, kemudian juga membahas mengenai pengelolaan dana yang ada di Bumdes, serta yang terakhir yaitu pembahasan mengenai pengembangan sumber daya manusia desa yang ada, khususnya di badan usaha milik desa Kecamatan Caringin, Bogor. Dari pembahasan mengenai ketiga topik tersebut dalam sosialisasi, para peserta sangat antusias dalam memahami materi yang dipresentasikan, sehingga muncul beberapa pertanyaan dari pihak Bumdes. Berikut adalah dokumentasi dari sosialisasi yang telah dilakukan:



Gambar 1. Tim PKM, Jajaran pejabat Kecamatan Caringin, dan para peserta sosialisasi



Gambar 2. Para peserta mengikuti sosialisasi

Pada hari ketiga sosialisasi, diskusi dan tanya jawab dilakukan lebih intens mengenai tata kelembagaan, pengembangan sumberdaya manusia, dan penggunaan dana desa pada Bumdes-Bumdes di Caringin Bogor. Sehingga pada akhirnya, arah diskusi dapat mengerucut pada bagaimana pihak Bumdes yang ada di Kecamatan Caringin, Bogor dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa di Bumdes desanya. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui adanya: 1) keterlibatan aktif masyarakat, 2) masukan dari masyarakat, serta 3) manfaat yang diperoleh dari Bumdes. Karena dalam hal ini, masyarakat akan lebih antusias dalam memberikan partisipasinya mengelola Bumdes, jika memperoleh manfaat darinya. Berikut adalah tabel ringkasan dari hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta di Kecamatan Caringin, Bogor.

Tabel 1. Hasil Sosialisasi pada Bumdes di Kecamatan Caringin, Bogor

Aspek Sosialisasi	Hasil Sosialisasi	Dampak yang Diharapkan
Tata Kelembagaan	Bumdes lebih memahami mengenai tata kelola kelembagaan pada pemerintahan desa, terutama badan usaha milik desa.	Bumdes ikut mendorong tumbuhnya partisipasi yang lebih dari masyarakat desa, dalam mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa, khususnya melalui Badan Usaha Milik Desa. Sehingga ke depannya, Bumdes dapat ikut secara aktif menyumbang keberhasilan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa.
Pengelolaan Dana Desa	Bumdes lebih memahami dan berhati-hati dalam mengelola dan menggunakan dana desa, terutama dalam kaitannya untuk turut menopang pembangunan desa secara keseluruhan, termasuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang masih perlu dibenahi.	
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bumdes lebih mengetahui dengan pasti bagaimana mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan aset sumber daya manusia mereka. Bumdes lebih memahami bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, antara	

lain: 1) rekrutmen, 2) pelatihan, dan 3) pengembangan karir.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik STIA LAN Jakarta ini menjadikan para perwakilan Bumdes dari 12 desa di Kecamatan Caringin, Bogor, yang sebagian besar merupakan pengelolanya juga, lebih memahami praktik tata kelola kelembagaan serta penggunaan dana desa oleh Bumdes. Di samping itu, mereka lebih mengetahui dengan pasti, bagaimana mengelola sumber daya manusianya serta mengembangkannya demi kepentingan kesejahteraan Bumdes dan masyarakat desa. Di mana secara keseluruhan, sosialisasi terhadap Bumdes di Kecamatan Caringin ini memberikan pemahaman mendalam terkait tata kelola kelembagaan, penggunaan dana desa, pengembangan sumber daya manusia, dan pada akhirnya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mengawasi Bumdes, terutama terkait pengelolaan dana demi tercapainya tujuan pembangunan desa.

5. SARAN

Dalam aspek tata kelembagaan Bumdes di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, para pengelolanya mulai memahami lebih baik melalui sosialisasi yang dilakukan. Namun begitu, pihak pemerintah kecamatan perlu juga membimbing dan mengevaluasi secara berkala, praktek kelembagaan dalam Bumdes di masing-masing desa. Di samping itu, evaluasi juga perlu dilakukan pada bagaimana Bumdes ini mengelola dan memanfaatkan aset sumber daya manusianya. Pihak pemerintah kecamatan selaku pembina, perlu mengetahui pengembangan apa sajakah yang telah dilakukan oleh Bumdes terhadap sumber daya manusianya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dan bahkan seringkali menjadi yang terpenting adalah monitoring dan evaluasi yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan Caringin terhadap pengelolaan dana desa yang akan, dan telah disalurkan pada Bumdes di masing-masing desa. Dalam hal ini, akuntabilitas Bumdes perlu lebih dituntut, demi keberhasilan pengelolaan Bumdes ke depannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengungkapkan terimakasih pada Politeknik STIA LAN Jakarta atas dukungan finansial dan sarana penelitian yang telah diperoleh. Bantuan tersebut sangat penting untuk memperlancar kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penulisan artikel jurnal ini. Penulis juga menghargai semua individu yang telah memberikan sumbangan, baik itu berupa informasi, diskusi, maupun masukan yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, U. (2020). Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 41–53.
- Darodjat, R., & Harrieti, N. (2025). Legal Aspects of BUMDes as Drivers of Village Economy: Aspek Legal BUMDes sebagai Penggerak Perekonomian Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 3046–3055.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Dream Litera Buana.
- Ghassani, S. A., Priyarsono, D. S., Rindayanti, W., & Seminar, A. U. (2023). Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor: pendekatan teori kelembagaan. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 48–55.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 136–142.

- Kusdiyanto, M. A., & Pahlevy, R. R. (2024). Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 21.
- Mubarok, L., & Turpyn, J. M. F. (2023). Kedudukan Hukum Bumdes dan Potensi Bumdes Dalam Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara: Legal Standing of Bumdes and Potential Of Bumdes In North Maluku Economic Growth. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 11(2), 115–135.
- Rohim, R. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 4(1), 18–34.
- Sakir, S., Walinegoro, B. G., & Wahyuni, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sendangarum DIY dalam Mempersiapkan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 175–185.
- Salman, R., Prihatiningtyas, W., Winarsi, S., & Pamoro, G. J. (2022). Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 276–290.
- Siswanto, H., Dewi, D. C., Maryanto, M. A., & Brahmono, B. (2023). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Maju Bersama Di Desa Jadian Baru Kecamatan Mulak Sebingkai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 163–176.
- Yenny, N., Putra, M., Anggraini, A., & Tanjung, A.-S. R. R. (2025). Analisis Perbandingan Sosial Ekonomi Desa dan Kota dalam Pembangunan Wilayah. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 103–115.